



Policy Brief

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

Oktober 2016

Perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan, namun demikian, keterlibatan perempuan belum optimal. Pemahaman dan wawasan perempuan tentang bagaimana mengembangkan pariwisata yang mendukung kelestarian lingkungan hidup masih terbatas, terlebih lagi kebijakan pemberdayaan perempuan di daerah selama ini belum mampu menyentuh kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal inilah yang menyebabkan perempuan sulit untuk berpartisipasi aktif pada setiap tahapan pembangunan pariwisata berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya. Untuk itu diperlukan pengembangan kompetensi stakeholders yang terkait dengan pembangunan pariwisata agar mampu mengembangkan kebijakan yang dapat meningkatkan keterlibatan perempuan bersama-sama dengan laki-laki dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan sehingga memberi manfaat ekonomi, sosial, dan budaya tanpa merusak lingkungan.

Policy Brief

Oktober 2016

Penulis:

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni
Rara Sugiarti
Rino A. Nugroho
Ryza D Pratiwi

Desain:

Martiyas A. Pamungkas

Alamat:

P3G LPPM/ FISIP
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan,
Surakarta
Phone (+62271) 637358
e-mail:
ismidwiastuti@staff.uns.ac.id
website: www.fisip.uns.ac.id

Mengapa keterlibatan perempuan dalam kepariwisataan perlu?

Beijing declaration and Platforms for Actions merumuskan duabelas sasaran strategis pembangunan yang mencakup dua belas bidang kritis, salah satunya adalah perempuan dan lingkungan. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan secara eksplisit agar: (1) melibatkan perempuan secara aktif di dalam pengambilan keputusan mengenai lingkungan di semua tingkatan; (2) meningkatkan kepedulian dan perspektif gender ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program untuk pembangunan berkelanjutan; dan (3) memperkuat atau membentuk mekanisme pada tingkat nasional, regional, dan internasional untuk menilai dampak pembangunan dan kebijakan-kebijakan lingkungan terhadap perempuan.

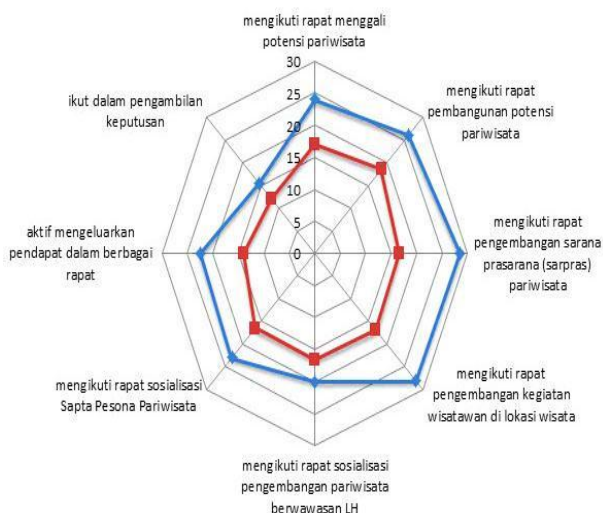
Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang strategis dalam melakukan edukasi lingkungan, baik bagi dirinya, anggota keluarganya, maupun masyarakat. Selain itu, perempuan memiliki antusiasme yang sama baiknya dengan laki-laki di bidang Pariwisata. Karena itu pengembangan pariwisata berkelanjutan akan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal apabila laki-laki dan perempuan bekerja bersama-sama di setiap tahap kegiatan pengembangan pariwisata berkelanjutan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasinya.

Situasi Keterlibatan Perempuan dalam Kepariwisataan

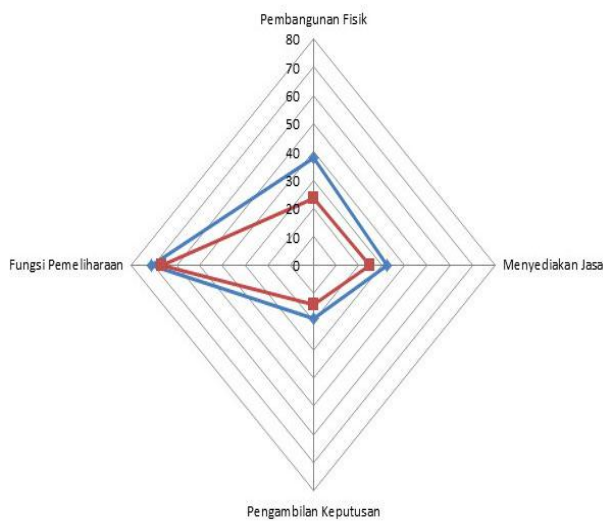
Keterlibatan perempuan dalam pembangunan pariwisata belum optimal. Hasil penelitian Nurhaeni, dkk (2014-2015) menemukan adanya pengabaian peran perempuan dibandingkan laki-laki dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Meskipun beberapa bidang pekerjaan kepariwisataan sudah melibatkan perempuan, keterlibatan mereka masih sebatas keterlibatan di level operator, belum keterlibatan pada posisi strategis, termasuk posisi manajerial. Kebijakan yang ada belum memihak pada optimalisasi pemberdayaan perempuan.

Hasil penelitian menemukan bahwa keterlibatan perempuan pada tahap perencanaan, senantiasa lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan disparitas gender tertinggi terjadi pada kegiatan mengikuti rapat pengembangan sarana prasarana (sarpras) pariwisata (disparitas gender -12), mengikuti rapat pengembangan kegiatan wisatawan di lokasi wisata (disparitas gender -11) dan aktif mengeluarkan pendapat dalam berbagai rapat (disparitas gender -8,5), mengikuti rapat pembangunan/pengembangan potensi pariwisata (disparitas gender -8), dan mengikuti rapat menggali potensi pariwisata (disparitas gender -7).

Tahap Perencanaan



Tahap Pelaksanaan



Pada tahap pelaksanaan pengembangan pariwisata ditemukan adanya pembagian peran tradisional gender dimana laki-laki diidentikkan dengan kegiatan-kegiatan pembanangunan fisik sedangkan perempuan dominan dalam menjalankan jasa pelayanan. Hasil studi Nurhaeni, dkk (2014) menemukan bahwa laki-laki lebih dominan berperan dalam kegiatan membangun sarana prasarana menuju lokasi wisata, membangun MCK di lokasi wisata, ikut menjaga keamanan di lokasi wisata serta ikut menjaga ketertiban di lokasi wisata.. Sebaliknya perempuan dominan melakukan kegiatan menyediakan jasa boga di lokasi wisata, menata tempat dan barang dagangan serta menjaga toko dan melayani pembeli. Temuan ini memperkuat peran tradisional gender dimana laki-laki diidentikkan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik sedangkan perempuan dominan dalam menjalankan jasa pelayanan.

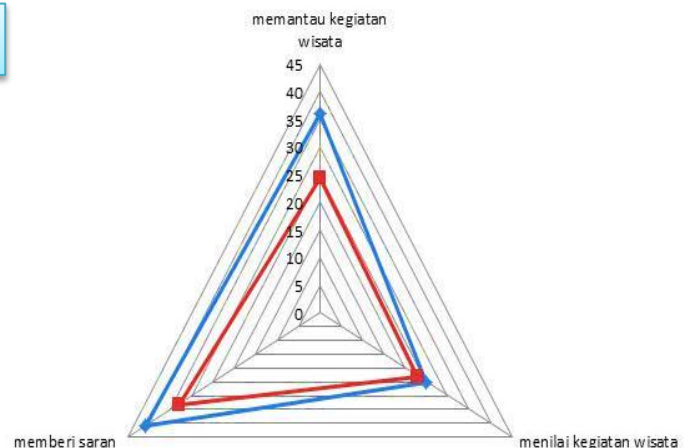
Pada tahap monitoring dan evaluasi, hasil studi Nurhaeni, dkk (2014) menemukan adanya dominasi laki-laki dalam memantau kegiatan wisata dan memberikan saran perbaikan sarana dan layanan wisata. Sebaliknya telah terjadi kesetaraan dan keadilan gender pada kegiatan menilai kegiatan wisata.

Rekomendasi Kebijakan

Perlu adanya peningkatan kompetensi stakeholders untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan , mencakup:

- 1) Kompetensi Teknis, yaitu kemampuan mengenali isu-isu gender dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan sensitivitas gender.
- 2) Kompetensi Manajerial, yaitu kemampuan menyusun: (1) perencanaan untuk memecahkan isu-isu gender dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, (2) penganggaran untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang responsif gender dapat dilaksanakan (3) Memonitor dan mengevaluasi. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan analisis gender bagi perencana di daerah.
- 3) Kompetensi Sosial, yaitu kemampuan melaksanakan komunikasi untuk mengimplementasikan kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan advokasi dan penyusunan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Pariwisata Berkelanjutan.
- 4) Kompetensi Intelektual, yaitu kemampuan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam visi misi daerah serta merumuskan indikator kinerja pembangunan responsif gender. Hal ini bisa dilakukan melalui sharing antara Bupati, Kepala Dinas/ Kantor/ Badan yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan, kelompok kerja (pokja) gender, Gender Focal Point serta Perguruan Tinggi dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap Pariwisata, Lingkungan dan gender.

Tahap Monitoring & Evaluasi



Referensi

Beijing Declaration and Platform for Action dalam <http://www.lbh-apik.or.id/fac-25.htm>

Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, dkk. 2004. *Reformasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup di Kawasan Gununglawu*. Universitas Sebelas Maret: 2014. (un published).

Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, dkk. 2016. *How gender mainstreaming appears in tourism governance: A Spider Chart Analysis*. Paper has been presented in Societies in Southeast Asia Cass (SOC 251), on September 12, 2016. Warren Wilson College, Asheville, North Carolina, The United State of America.